DIMAS SOSIAL DAN PETIERECKYANI MAST/ARAKAT PORTAL TARAKAN BERGA PETIERECKYANI MAST/ARAKAT BERGA PETIERECKYANI MAST/ARAKAN BERGA PETIERECKYANI MAST/ARAKAN BERGA PETIERECKYANI MAST/ARAKAN BERGA PETIERECKYANI MAST/ARAKAN BERGA PETIERECKYANI BERGA	 Disimpan sebagai data arsiparis dan diagendakan dengan baik. 		Cara me
DINAS SOSIAL DAN PERIBERA/YAAN MASYARAKAT BIDANG SOSIAL BIDANG S	 Disimpan sebagai data arsiparis dan diagendakan dengan baik. 		
DINAS SOSIAL DAN PEIBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL DAN PEIBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARRAKAN BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIA	 Disimpan sebagai data arsiparis dan diagendakan dengan baik. 		
DINAS SOSIAL DAN PEIBBERA/YAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL BIDANG SO	 Disimpan sebagai data arsiparis dan diagendakan dengan baik. 	(esehatan	- Klien tidak memiliki identitas KTP/KK dan BPJS k
DINAS SOSIAL DAN PEJIBEEDAYAAN MASYARAKAT BIDANG SOSIAL BIDANG S	1 Disimpan sehagai data arsibaris dan diagendakan dengan baik.		
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL DAN PEMANGANAN WARGA NEGARA KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL DAN PEMANGANAN WARGA NEGARA BIDANG SOSIAL DAN PEMANGANAN WARGA NEGARA CITTANGGA Revisit Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Disahkan			Peringatan:
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL	Pencatatan dan Pendataan		
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL BID			
DINAS SOSIAL DAN PENBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Mana SOP Peraturan Menteri Sosial No. 31 Tahun 2010 tentang Pengelipi Sosial; Peraturan Menteri Sosial No. 51 Tahun 2010 tentang Standar Teknis Pelayanan Desar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Peraturan Menteri Sosial No. 51 Tahun 2011 tentang Pengelipisan Penkelipisan Desar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Peraturan Menteri Sosial No. 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyebingan Pengelipisan P		ical, Lanjar Com Commission, American	4. SOP Pemberian Pelayanan Reuriilikasi Nelualga bagi Disabilikasi Terlah
DINAS SOSIAL DAN PERBERDAYAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL BIDANG SOSI	4. Mobil Kedaruratan	tar I aniut IIsia Terlantar Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	o. Och relaksatlaati Nujukati Nuisii Otalig Deligati Otaligati Ota
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN WARGA NEGARA BIDANG SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN WARGA NEGARA BIDANG SOSIAL DAN PEMANGANAN WARGA NEGARA BIDANG SOSIAL DAN PEMANGANAN WARGA NEGARA BIDANG SOSIAL DAN PEMANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN SISIT HUKUM: BIDANG SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN WARGA NEGARA BIDANG SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN WARGA NEGARA BIDANG SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Nama SOP Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial; Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial; Peraturan Menteri Sosial No. 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial; Peraturan Menteri Sosial No. 16 Tahun 2019 tentang Standar Pempelilaran Provential Nasional Rehabilitasi Sosial; Peraturan Menteri Sosial No. 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial; Peraturan Menteri Sosial No. 16 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Propasional Propasional Pemperintah Kota Tarakan; Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Peraturan Walikota No. 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan SOP Pelaksanaan Maseuk dan Keluar Shelter/Fumah Singgah SOP Pelaksanaan Maseuk dan Keluar Shelter/Fumah Singgah	3. Printer) ke RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan	3 COD Delaksanaan Rujirkan Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 tentang Pendelatan PMKS dan PSKS Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Pendelatan PMKS dan PSKS Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2014 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Menteri Sosial No. 16 Tahun 2014 tentang Standar Nesional Rehabilitiasi Sosial; Peraturan Menteri Sosial No. 16 Tahun 2014 tentang Standar Nesional Rehabilitiasi Sosial; Peraturan Menteri Sosial No. 16 Tahun 2014 tentang Standar Nesional Rehabilitiasi Sosial; Peraturan Menteri Sosial No. 16 Tahun 2014 tentang Standar Nesional Rehabilitiasi Sosial; Peraturan Walikota No. 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan; Peraturan Walikota No. 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Otganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Sosparakat Sopial Keriatan Kaluar Shelter/Furnah Singgah	2. Notification		SOP Pelaksanaan Penyediaan Permakanan Nasi Bungkus
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG SOSIAL BIDANG SO	2 Komputer		 SOP Pelaksanaan Masuk dan Keluar Shelter/Rumah Singgah
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL KOTA TARAKAN MIGRAN KORBAH TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL KOTA TARAKAN MIGRAN KORBAH TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL KOTA TARAKAN MIGRAN KORBAH TINDAK KEKERASAN Nama SOP MIGRAN KORBAH TINDAK KEKERASAN Nama SOP Peraturan Menteri Sosial No. 39 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial: Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial: Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Peraturan Menteri Sosial No. 6 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Rehabilitasi Sosial; Peraturan Walikota No. 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan; Peraturan Walikota No. 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan asyarakat.	A ATV.		Keterkaitan :
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL BID	Boroloton don Dodonokanan		Masyarakat.
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN SER THIKUM: Undeng-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial: Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial: Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Tekriis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial; Peraturan Menteri Sosial RNo. 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial; Peraturan Menteri Sosial RNo. 16 Tahun 2014 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan; Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;		ganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan	3. Peraturan Walikota No. 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Or
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL BIDANG SOSI		tandar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;	7. Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan S
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL MORGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL MORGAN WARGA NEGARA Nama SOP MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL MORGAN WARGA NEGARA Nama SOP Nama SOP Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Pokatilikan Disahtera Managan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan bapaten/Kota;		Nelidolillasi oosiai,	Peraturan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasiona
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DISahikan Oleh		Dobabilità e i Cocial:	Vapupatelinota,
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN SSEKSI REHABILITASI SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN SSER Hukum: Undang-Undang No. 39 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelanggaraan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 tentang Pendataan PMKS dan PSKS Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 tentang Pendataan PMKS dan PSKS Peraturan Menteri Sosial di Deerah Provinsi dan		Malian Dana Common Company	Peraturan Menteri Sosiai No. 9
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL MARGA NEGARA Nama SOP Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelanggaraan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelanggaraan Kesejahteraan Sosial;		ar i Gro wanan Dasar nada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi di	Peraturan Menteri Sosial No. 8
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Revisi Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Tanggal Pengesahan Tanggal Pengesahan Tanggal Pengesahan Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Tanggal Pengesahan Nanggal Pengesahan Nanggal Pengesahan Tanggal Pengesahan Nanggal Pengesahan Tanggal Pengesahan Nanggal Pengesahan Tanggal P	 Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang rehabilitasi sosial 	Associative data contain	8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pengelahan DMKS da
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA, TARAKAN BIDANG SOSIAL MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BIDANG SOSIAL MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN SSAR Hukum: Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;	Mampu mengoperasikan komputer.	Geolahteraan Social	. Undang-Undang No. 14 Tanun 2019 tentang Pekerja Sosial,
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Nama SOP MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Nama SOP	2. Berliwa sosial tinggi;		
S SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN BIDANG SOSIAL BILITASI SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Nama SOP	Pendidikan Pelaksana minimal SMA atau sederajat;		Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP	Kualifikasi Pelaksana :		
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	Pelaksanaan Rujukan Klien Terlantar Sakit ke Puskesmas		BIDANG SOSIAL SEKSI REHABILITASI SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh			
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	NIP. 196803181994031007		
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	Pembina Utama Muda/IV-c	\	
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	Arbain, SE., M. AP		KOTA TARAKAN
mbuatan visi ngesahan leh			DINAS SOSIAI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
mbuatan visi ngesahan			
mbuatan visi ngesahan	Kota Tarakan		
mbuatan visi	Kepala Dinas Sosial - PM	Disahkan Oleh	
mbuatan visi	22 Oktoberi 2025	Tanggal Pengesahan	TO THE WAY
mbuatan	22 Oktober 2025	Tanagal Revisi	TABA
	9 Agustus 2022	Tanggal Pembuatan	
	000.8.3.3/32/ DINSUSEM	Nomor SOP	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN RUJUKAN KLIEN TERLANTAR SAKIT KE PUSKESMAS

.				NO.	
4 Se klie	3 Me	2 Pe kee	ter Pe	Ò	-
Setelah selesai diperiksa dan diberikan obat, klien dibawa kembali ke Shelter/Rumah Singgah	Mengantar kilen terlantar ke puskesmas	Petugas memeriksa identitas dan jaminan kesehatan kiien terlantar sebelum dibawa ke puskesmas	Petugas Shelter melaporkan kondisi klien terlantar yang sedang sakit di shelter	URAJAN PROSEDUR	
				PENGADMINISTRASI IPENDAMPING REHSOS	
		à	Tidak	PENGADMINISTRASI/PETUGAS SHELTER/PENDAMPING SOSIAL/PEKSOS/TRC/SUB. KOORDINATOR REHSOS	PELAKSANA KEGIATAN
	+			PENGADMINISTRASI/PETUGAS SHELTER/PENDAMPING SOSIAL/PEKSOS/TRC	KEGIATAN
				PETUGAS SHELTER	
		a. Kelengkapan berkas yang telah diverfikasi;	a. Identitas diri KTP/KK (bila ada); b. BPJS Kecehatan (bila ada).	Kelengkapan	And the second s
1 hari	15 menit	30 menit	60 menit	Waktu	MOIL
		a. Kelengkapan berkas yang telah diperiksa;	a. Kelengkapan berkas yang telah disiapkan;	Output	MOIUBAKU
				Keterangan	

